

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982. Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, (Jakarta: Karya Unipres,)
- Bambang Tri Bawono, 2011, Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan MalPraktek Profesi Medis, Fakultas Hukum Unissula
- Bambang Poernomo, 1988, Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Liberty,
- Dirjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminalogi. Jakarta: Rajawali.
- M. Yahya Harahap. 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia,
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- \_\_\_\_\_ 1992, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru,)
- R. Soesilo, 1980, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: politea,
- Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2001 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada,

## **B. Jurnal**

1. Jurnal Bambang Tri Bawono, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Fakultas Hukum Unissula, hlm 454
2. Jurnal Rena Yulia & Aliyih Prakarsa, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm 62
3. Jurnal, Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia*, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto hlm 14
4. Ricky 2020 *Aspek Hukum Praktek Kedokteran melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan kompetensi profesinya*, No. 2 Volume 5, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 406
5. Jurnal, Hargianti Dini Iswandari, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Suatu Tinjau Berdasarkan Undang-Undang No.9/2004 Tentang Praktik Kedokteran*, Universitas Soegiopranoto Semarang hlmn 53

## **C. Peraturan Perundang – Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 (yang sudah di ganti dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009) Tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2001 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat